

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TANJUNG  
MEDANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN  
MUARA ENIM PADA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam  
Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Diajukan Oleh :  
Tiara Sari  
07011281320039**

**Konsentrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TANJUNG  
MEDANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN  
MUARA ENIM PADA TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Oleh :

TIARA SARI

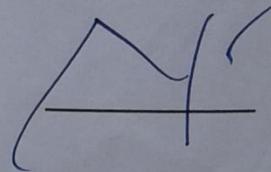
07011281320039

Telah disetujui oleh dosen

Pembimbing, 2018

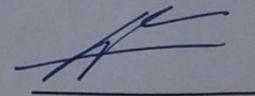
Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. NIP. 19631106 199003 1001



Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si  
NIP. 19660305 199302 2001



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 19 April 2018.

Indralaya, 19 April 2018

Ketua:

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Anggota:

1. Dra. Martina, M.Si  
NIP. 196603051993022001

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

3. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

Mengetahui:



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Administrasi Negara,



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA**  
NIP. 198108272009121002

**Motto :**

**Orang yang paling beruntung adalah dia yang mampu mengambil hikmah dari setiap kesusahan yang didapat, jadikanlah Sholat dan sabar sebagai penolongmu**

**(Tiara Sari)**

**Kupersembahkan skripsi ini untuk :**

- 1. Kedua orang tuaku terkasih,**
- 2. Keluargaku,**
- 3. Sahabat-sahabatku,**
- 4. Almamaterku.**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai dari dana desa tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari dana desa kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta tidak adanya laporan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Medang pada tahun 2016 belum berjalan baik karena masih terdapat hambatan dalam setiap proses pengelolaan dana desa baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran serta pertanggungjawaban sehingga menyebabkan tujuan dari program dana desa tidak tercapai secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya peran dan fungsi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam proses pengelolaan dana desa. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan pada organisasi pemerintah desa dan masyarakat desa mengenai peran dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten mengenai peran dan fungsi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Desa Tanjung Medang**

## **ABSTRACT**

*This study is based on the physical implementation of development activities that were funded by the village is not in accordance with the specified planning and community development activities that were funded by the village of less benefit to society and the absence of a report to the public on the implementation of village funds. The purpose of this study was to determine the problems that arise in the process of fund management at the village of Tanjung Medang Kelekar District of Muara Enim regency in 2016. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques through the documentation, observation and interview. The results showed that the management of funds in the village of Tanjung Medang in 2016 has not gone well because there are obstacles in every village fund management process both at the planning, implementation and budgeting and accountability, causing purpose of the village funds program was not reached its full potential. That is because of less optimal role and function of the village government and villagers in the village fund management process. Therefore, it is necessary efforts to improve the organization of village government and community members about the role and function in the management of village funds through socialization organized by the district government and district on the role and functions of village government and villagers in the management of village fund in accordance with the rules that have been set.*

**Keywords: Management, Village Funds, Tanjung Medang Village**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku terkasih, Jahri dan Baina, serta ayukku Serli Wulandari , adikku Jodi Ramadhan dan Fahri Ananda yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayang yang tak terbatas.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dra. Martina. M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra. M.Si sebagai Pembimbing Akademik.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pemerintah dan masyarakat Desa Tanjung Medang yang dengan ramah membantu penulis untuk menghimpun informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat dan adik-adik terbaikku Annisa, Susnani, Linda, Rami, Dini, Serik, Nadia, Kiki, Riki, Susan, Mei, Putri, Wahyu, Irsad, Dedi, Rizki, Sandi, Arif, Andrian, Maya, Mida, dan Uliya terima kasih untuk persaudaraan dan kenangan indah yang kita lewati bersama, serta motivasi dan doa yang selalu diberikan selama ini dan teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013 Kampus Indralaya.
12. Saudaraku di organisasi LDF WAKI FISIP UNSRI, BEM KM UNSRI, IKAMAGEL, KAMMI dan IRMAS NURUL FALAH yang telah memberikan banyak pengalaman.

Semoga dukungan dari bapak/ibu, saudara dan teman-teman diberikan balasan pahala disisi Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat kesalahan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, April 2018

Tiara Sari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv

### BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9

### BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	10
B. Keuangan dalam Administrasi Negara.....	10
C. Keuangan Daerah .....	13
D. Gambaran Penggunaan Dana Desa.....	14
1. Desa .....	14
2. Pembangunan Desa.....	16
3. Pemberdayaan Masyarakat .....	18
4. Dana Desa.....	19
E. Keuangan Desa.....	22
F. Konsep Pengelolaan .....	26
G. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	27
H. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016.....	30
I. Penelitian Terdahulu.....	31
J. Teori yang Digunakan .....	32
K. Kerangka Pemikiran .....	37

### BAB. III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Definisi Konsep .....	40

C. Fokus Penelitian .....	40
D. Unit Analisis Data .....	41
E. Jenis dan Sumber Data .....	41
F. Informan Penelitian .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	42
H. Teknik Analisis Data .....	43
I. Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim .....	46
a. Keadaan Umum Kecamatan Kelekar .....	46
b. Visi Misi Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim .....	48
c. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kelekar .....	49
d. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Kelekar .....	49
2. Desa Tanjung Medang .....	54
a. Keadaan Umum Desa Tanjung Medang.....	55
b. Visi Misi Desa Tanjung Medang.....	58
c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Medang.....	59
d. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Tanjung Medang .....	60
B. Pembahasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang.....	63
1. Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa .....	63
a. Perencanaan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang Ingin Dicapai dalam Program Dana Desa yaitu Adanya Musyawarah Desa yang Melibatkan Masyarakat.....	63
b. Penyusunan Anggaran Dana Desa Oleh Sekretaris Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sesuai dengan waktu yang Telah Ditentukan .....	71
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa.....	76
a. Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Berdasarkan Rencana Kegiatan .....	77
b. Realisasi Anggaran Dana Desa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang Telah Ditetapkan dan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan .....	84
3. Pertanggungjawaban Dana Desa .....	92
a. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Diperiksa Secara Internal Oleh BPD dan Masyarakat .....	92
b. Membuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa dan Diperiksa Secara Eksternal Oleh Bupati Melalui Camat.....	96
C. Hasil Pembahasan .....	99
<b>BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Nama Desa di Kecamatan Kelekar .....	4
2. Besaran Dana Desa di Kecamatan Kelekar Tahun Anggaran 2016 .....	5
3. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.....	7
4. Fokus Penelitian .....	41
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	47
6. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tiingkat Pendidikan .....	56
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencharian.....	57
8. Anggaran Dana Desa dalam APBDes Tanjung Medang.....	74
9. Realisasi Dana Desa Tahun 2016 .....	84
10. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa.....	97
11. Hasil Pembahasan.....	99

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Jalan Setapak Desa dan Lapangan Voli Desa.....	8
2. Kerangka Pemikiran .....	38
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kelekar .....	49
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Medang .....	59
5. Alur Perencanaan Penggunaan Dana Desa .....	67
6. Musyawarah Desa Tanjung Medang .....	68
7. Daftar Hadir Musyawarah Desa .....	68
8. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Gedung PAUD.....	85
9. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jalan Cor Beton .....	85
10. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Siring .....	85
11. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Lapangan Bola Voli.....	86
12. Bantuan Bibit Itik berjumlah 3284 .....	89
13. Nota Pembelian Bibit Itik .....	89
14. Serah Terima Bibit Itik Kepada Masyarakat Desa dengan Menyerahkan KK.....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Pedoman Wawancara .....	106
2. Rincian APBDes Tanjung Medang .....	111
3. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi .....	115
4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi dan Skripsi Pembimbing II .....	116
5. Surat Izin Penelitian di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim .....	118
6. Surat Izin Penelitian di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim .....	119
7. Peraturan Desa Tanjung Medang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Tahun 2016 .....	120
8. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD .....	122
9. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2016 .....	124
10. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim .....	125
11. Musyawarah Desa .....	127
12. Berita Acara Penyerahan Bibit Itik .....	130
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .....	131
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .....	138
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	149
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	158

## DAFTAR ISTILAH

Aktiva	: Kekayaan
Anggaran	: Perkiraan
Audit	: Pemeriksaan Pembukuan Tentang Keuangan
Efektif	: Berhasil Guna
Efisien	: Berdaya Guna
Evaluasi	: Penilaian
Finansial	: Ketersediaan Keuangan
Fiskal	: Berkenaan Dengan Urusan Pajak atau Pendapatan Negara
Hipotesis	: Dugaan Sementara
Holistik	: Keseluruhan
Integritas	: Kejujuran
Investasi	: Penanaman Uang atau Modal
Moneter	: Berhubungan dengan Uang atau Keuangan
Observasi	: Pengamatan
Program	: Tata Olah
Proporsional	: Seimbang
Rasional	: pemikiran dan pertimbangan yang logis
Realisasi	: Proses Menjadikan Nyata atau Perwujudan
Relevan	: kesesuaian anantara perencanaan dan hasil
Sektor	: Lingkungan Suatu Usaha
Stakeholder	: Kelompok yang Dapat Mempengaruhi atau Terpengaruh
Unit	: Komponen

## DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPS	: Badan Pusat Staistik
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KK	: Kartu Keluarga
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKD	: Rekening Kas Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
PPHP	: Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hakikatnya pembangunan nasional adalah suatu hal fundamental yang harus dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Salah satu ciri keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan nasional adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat baik di desa maupun kota namun hingga sekarang kesejahteraan tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat desa karena masih terdapat ketimpangan pembangunan antara kota dan desa yang berdampak pada semakin tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yaitu penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8,60% dan penduduk desa dengan kemiskinan sebesar 14,70%.

Menanggapi permasalahan ketimpangan pembangunan, strategi pemerintah untuk mengatasinya yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan yang ada di desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Tujuan adanya undang-undang desa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui bantuan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menopang pembangunan desa.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembentukan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengacu pada pasal 72 ayat 1 poin (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang dianggarkan bagi desa mempunyai jumlah yang cukup besar sehingga dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana didalamnya telah diatur bagaimana tahap-tahap pengelolaan keuangan desa yang baik. Tahap-tahap tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan proses pencatatan pada saat pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh menteri yang menangani desa. Pelaksanaan yang nyata, harus berdasarkan perencanaan yang telah disusun, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan harus berdasarkan kondisi pelaksanaan dilapangan dan pertanggungjawaban berdasarkan laporan.

Selain itu, sebagai bentuk pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana pasal 4 menyatakan bahwa penggunaan dana desa yaitu diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam pasal 6 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana di bidang pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi; dan
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam pasal 8 prioritas penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat dan desa, yaitu :

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralel dan bantuan hukum masyarakat desa termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan dan pantai;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Adanya prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 memiliki tujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 2 yaitu untuk menentukan program dan kegiatan bagi masyarakat, hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh

dana desa. Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa prinsip penggunaan dana desa adalah dengan memperhatikan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini, menjadi pedoman untuk semua pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengelola dana desa.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan yang terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya pembangunan di desa-desa dalam Kabupaten Muara Enim melalui anggaran dana desa. Ketentuan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016. Peraturan ini merupakan syarat disalurkan dana desa ke setiap desa dalam Kabupaten Muara Enim. Salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana desa yaitu Desa Tanjung Medang. Desa ini terletak di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Selain Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar juga terdiri dari beberapa desa lain sebagai wilayah administrasi. Berikut nama-nama desa di Kecamatan Kelekar :

**Tabel 1 Nama Desa di Kecamatan Kelekar**

No.	Nama Desa
1.	Embacang Kelekar
2.	Menanti
3.	Menanti Selatan
4.	Suban Baru
5.	Pelempang
6.	Teluk Jaya
7.	Tanjung Medang

*Sumber : Kantor Desa Tanjung Medang, 2016*

Berdasarkan tabel 1, Kecamatan Kelekar terdiri dari 7 desa dimana setiap desa mendapatkan bantuan dana desa yang bervariasi sesuai dengan potensi desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan yang ada di desa. Berikut rincian besaran dana desa yang digulirkan di desa-desa dalam Kecamatan Kelekar pada anggaran tahun 2016 :

**Tabel 2 Besaran Dana Desa di Kecamatan Kelekar Tahun Anggaran 2016**

No.	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Alokasi Dasar	Berdasarkan Formula	
1.	Embacang Kelekar	565.640.000	42.309.000	607.949.000
2.	Menanti	565.640.000	47.828.000	613.468.000
3.	Menanti Selatan	565.640.000	29.628.000	595.268.000
4.	Suban Baru	565.640.000	49.741.000	615.381.000
5.	Pelempang	565.640.000	54.637.000	620.277.000
6.	Teluk Jaya	565.640.000	53.800.000	619.440.000
7.	Tanjung Medang	565.640.000	60.773.000	626.413.000
Jumlah		3.959.480.000	338.716.000	4.298.196.000

*Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016*

Berdasarkan Tabel 2 Desa Tanjung Medang merupakan desa yang mendapatkan jumlah bantuan dana desa terbesar di Kecamatan Kelekar karena dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Desa Tanjung Medang masih banyak tertinggal dari desa lainnya serta berdasarkan kondisi geografis desa yang kurang strategis. Luas Wilayah Desa Tanjung Medang adalah 1.612 ha/m<sup>2</sup> dibagi menjadi 3 dusun dengan total jumlah Kepala Keluarga (KK) 346 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 6 Kepala Keluarga (KK) Perempuan dan 340 Kepala Keluarga (KK) laki-laki.

Jumlah dana desa yang mencapai Rp 626.413.000,- menimbulkan pertanyaan apakah desa beserta *stakeholder* yang terlibat seperti aparatur desa dan masyarakat desa sudah mampu untuk melaksanakan pengelolaan dana desa secara baik. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa sebelum dikeluarkan peraturan tentang otonomi daerah berbeda karena dalam melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan pemerintahan pusat.

Akan tetapi, semenjak dikeluarkannya kebijakan tentang dana desa, desa mendapatkan dana yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh desa sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola dana desa masih dipertanyakan. Ditambah lagi dengan kondisi Desa Tanjung Medang masih dalam tahap membangun juga memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga mempengaruhi proses pengelolaan dana desa.

Desa Tanjung Medang selain mendapatkan bantuan keuangan dari dana desa juga mendapatkan bantuan keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) turut menopang pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga pembangunan fisik desa sebagian besar sudah dilakukan seperti pembangunan jalan utama, jalan setapak, jalan cor beton dan siring sedangkan untuk bidang pemberdayaan digunakan untuk pelatihan pemerintah desa serta belanja perlengkapan kerja perangkat desa.

Penggunaan dana desa yang mulai digulirkan pada tahun anggaran 2015 di peruntukan untuk melengkapi kekurangan pembangunan yang sudah ada sebelumnya seperti pembangunan jalan setapak, pembangunan jalan cor beton, pembangunan siring dan pembangunan kantor desa sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembelian bibit padi dan mesin bajak sawah. Kemudian pada tahun anggaran 2016 pemerintah desa memfokuskan bantuan dana desa untuk kembali melengkapi pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan cor beton, jalan setapak di setiap dusun, lapangan voli dan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembelian bibit itik sebanyak 3485 ekor. Berikut realisasi penggunaan dana desa di Desa Tanjung Medang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjung Medang :

**Tabel 3 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016**

No.	Nama Kegiatan	Volume	Biaya
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Pembangunan Jalan Cor Beton Setapak P 307 Meter X L 3 Meter Volume 921	1	198.000.000
	b. Pembangunan Siring 310 Meter	1	105.130.000
	c. Pembangunan PAUD 1 Unit (UK 6x12) lengkap sarana penunjang	1	198.000.000
	d. Pembangunan Lapangan Volly dan tiang 3 unit	1	17.500.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu pembelian bibit itik	3458	107.782.600
Total			626.413.000,00

Sumber data : Peraturan Desa Nomor 01/APB-DES/KDTM/2016 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan Tabel 3 dana desa di Desa Tanjung Medang Anggaran Tahun 2016 telah terealisasi 100% dan berdasarkan laporan akhir realisasi dana desa memang benar dana desa telah terserap dengan baik. Hal itu menunjukkan bahwa dana desa dapat terserap dengan maksimal dan pembangunan di desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, pada tahap perencanaan penggunaan dana desa, pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merumuskan program-program yang dibiayai oleh dana desa. Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan masih ada pembangunan yang tidak dibangun sesuai dengan perencanaan awal seperti pembangunan lapangan voli yang seharusnya di bangun 3 unit hanya dibangun sebanyak 2 unit. Kemudian pemerintah desa hanya berfokus pada pembangunan fisik desa yang secara tidak langsung mengenyampingkan program pemberdayaan masyarakat desa yang tidak terlaksana dengan baik sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pembangunan-pembangunan fisik yang telah dilaksanakan tidak mampu bertahan lama misalnya pembangunan lapangan voli dan jalan setapak yang seharusnya mampu bertahan lama belum mencapai 4 bulan sudah mengalami kerusakan.



Gambar 1 Jalan Setapak Desa dan Lapangan Voli Desa  
Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2017

Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa tidak menyajikan informasi atau laporan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Padahal, dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40 pada tahap pertanggungjawaban menjelaskan bahwa laporan realiasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diinformasikan kepada masyarakat. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan dana desa yang bersumber dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan uraian berbagai permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji pengelolaan dana desa yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang yang telah dilaksanakan pada anggaran tahun 2016, agar dapat mengetahui apakah dalam proses pengelolaan dana sudah berjalan dengan baik (sesuai dengan peraturan yang berlaku) atau belum (terdapat berbagai permasalahan). Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kajian ilmu administrasi negara khususnya konsentrasi keuangan negara serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan solusi bagi pemerintah Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan program-program selanjutnya agar penggunaan dana desa lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Devas, dkk. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi Manajemen dan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskadaya
- Setiyono, B. 2004. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publising Service)
- Stoner, J.A.F. 1996. *Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi: Metode R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Admnistrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara FISIP Unsri
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim.

Peraturan Desa Tanjung Medang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

**Internet :**

Sulastri, N. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapode*. Skripsi. Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, [http://sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/sitedi.pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/sitedi.pdf). Diakses pada 20 Desember 2016 Pukul 19.00 WIB).

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Pemerintahan Integratif, 1 (1):51-64, <http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads.pdf>. Diakses pada 20 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB).

Wida, S. A. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/pdf>. Diakses pada 20 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB).

Badan Pusat Statistik. 2015. Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia. *Badan Pusat Statistik*<http://www.bps.go.id>. Diakses 20 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB.